

Analisis Kritis Dikotomi Etika: Konvergensi Pemikiran Aristoteles, Plato, Minangkabau, dan Siri' dalam Kepemimpinan Publik

1. Pendahuluan

Dalam diskursus filsafat global dan tata kelola pemerintahan, perbedaan karakteristik etika antara peradaban Barat dan Timur kerap kali dipahami melalui kaca mata yang dikotomis. Tradisi pemikiran Barat sering kali diidentikkan dengan nilai-nilai rasionalisme yang memberikan otonomi serta kebebasan individual yang sangat besar bagi manusia (Lasiyo, 1997). Sebaliknya, etika Timur secara historis dikarakteristikan sebagai sistem yang komunal, di mana eksistensi manusia dititikberatkan pada peran esensialnya sebagai anggota masyarakat yang harus menjaga keharmonisan, pemikiran dalam makalah Analisis Kritis Dikotomi Etika: Konvergensi Pemikiran Aristoteles, Plato, Minangkabau, dan Siri' dalam Kepemimpinan Publik ini hadir guna menjawab pertanyaan utama yang bersifat pemisahan dalam konteks mendalami anggapan bahwa etika Barat bersifat individualistik dan etika Timur bersifat komunal jika dianalisis secara kritis melalui perspektif pemikiran Aristoteles dan Plato, serta dibandingkan dengan ajaran budaya Minangkabau dan konsep si'ri'?

Pemisahan antara "individualisme Barat" dan "komunalisme Timur" ini, meski mempermudah pemetaan diskursus lintas budaya, pada hakikatnya merupakan penyederhanaan yang sangat reduktif. Telaah kritis terhadap landasan filosofis klasik Barat (seperti pemikiran Plato dan Aristoteles) dan tradisi kearifan lokal Timur (seperti adat Minangkabau dan Siri' di Bugis) justru mengungkap konvergensi etis yang kuat. Makalah ini secara spesifik menganalisis pernyataan dikotomis tersebut untuk membuktikan bahwa baik etika Barat maupun Timur pada dasarnya sama-sama mengakui urgensi moral dalam mengintegrasikan otonomi individu dengan norma dan kewajiban sosial guna mewujudkan tata kelola yang beradab. referensi yang menjadi rujukan dalam penyusunan makalah ini bersumber pada berbagai literatur baik yang disediakan di perkuliahan Universitas Terbuka, maupun artikel ilmiah dan buku yang terindeks pada database Scopus.

2. Pembahasan

2.1 Fondasi Etika Barat: Otonomi Rasional demi Keadilan Sosial

Pandangan bahwa etika Barat murni bersifat individualistik dan egois mengabaikan esensi moral dari filsafat Yunani klasik. Dalam pemikiran klasik, otonomi rasional

individu justru dikembangkan sebagai instrumen etis untuk mencapai keadilan sosial di dalam tatanan negara atau polis.

- Aristoteles dan Rasionalitas Praktis (Phronesis): Sistem etika Aristoteles bersumbu pada kultivasi kebajikan melalui kebijaksanaan praktis atau phronesis (Russell, 2012). Phronesis bukan sekadar rasionalitas kognitif, melainkan kemampuan moral individu untuk menyeimbangkan hasrat pribadi dengan kewajiban serta ekspektasi komunitasnya. Bagi Aristoteles, kebajikan individu harus ditanamkan melalui pembiasaan sosial, dan kebahagiaan sejati (eudaimonia) hanya mungkin terealisasi apabila individu berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunal di polis.
- Plato dan Harmoni Jiwa: Etika Platonis menstrukturkan moralitas melalui harmoni tiga bagian jiwa manusia: nalar (logika), semangat (thymos), dan hasrat (emosi). Otonomi etis tercapai manakala nalar rasional memimpin dan menundukkan hasrat egoistik demi kebaikan bersama. Plato menegaskan bahwa tatanan individu yang adil adalah mikrokosmos dari tatanan polis yang adil, sehingga rasionalitas individu mutlak diabdikan untuk kesejahteraan sosial dan kosmis.

2.2 Akar Etika Komunal Timur: Otonomi Moral dalam Tanggung Jawab Kolektif

Apabila etika Barat mendisiplinkan individu untuk masuk ke dalam tatanan sosial, etika Timur merumuskan tugas komunitas untuk kemudian secara organik membentuk integritas dan subjektivitas moral dari tiap-tiap individu di dalamnya.

- Falsafah Minangkabau dan Musyawarah: Tata kelola etis di Minangkabau terepresentasi kuat dalam institusi Nagari yang menyatukan hukum adat dengan nilai-nilai agamis melalui filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Maulana et al., 2025). Keputusan publik diambil melalui prinsip musyawarah (konsensus) yang menolak asersi egoistik demi kohesi sosial. Namun, tatanan komunal ini mewajibkan setiap individu untuk memiliki moralitas personal yang luhur, seperti hiduik baraka (hidup berbasis nalar akal) dan tenggang raso (kepekaan dan empati terhadap manusia lain) (Suryandari, 2025).
- Etos Siri' pada Masyarakat Bugis: Etika komunal masyarakat Bugis ditegakkan melalui prinsip kehormatan dan etos moral Siri' (perasaan malu jika melanggar kepatutan). Nilai Siri', bersama dengan kejujuran dan keteguhan, berfungsi membingkai otonomi individu agar senantiasa selaras dengan kepatutan kolektif dan hukum yang berlaku secara komunal (Suryandari, 2025).

2.3 Sintesis Etis: Menjembatani Otonomi dan Norma Relasional

Baik pada peradaban Barat yang memprioritaskan hak individu (Charvet, 1998) maupun peradaban Timur yang menekankan tanggung jawab kolektif, keduanya berkonvergensi pada hakikat "relasionalitas". Pemikir kontemporer seperti Tetsurō Watsuji dengan konsep Aidagara ("kebersamaan") serta Luce Irigaray mengkritik individualisme atomistik Barat dengan menegaskan bahwa identitas etis manusia selalu terbentuk dari relasinya dengan manusia lain (McCarthy, 2011). Baik institusi polis di Barat maupun nagari di Timur esensinya adalah wadah institusional untuk memediasi otonomi pribadi dan kewajiban publik agar terhindar dari absolutisme kekuasaan. Pada dasarnya dalam konteks menjembatani otonomi dan norma relasional dapat kita ungkap bahwa etika Bugis tidak hanya bertumpu pada Siri', melainkan ditopang oleh kesatuan enam nilai utama, yaitu nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan, usaha, dan Siri' itu sendiri

2.4 Implikasi Etis bagi Kepemimpinan Kontemporer

Pemahaman terhadap sintesis ini membawa implikasi signifikan bahwa tata kelola publik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral (Ismail, 2017). Kepemimpinan global yang etis dewasa ini memerlukan integrasi otentik: meminjam ketajaman nalar otonom (phronesis) ala Barat, sembari memeluk prinsip keberlanjutan, kepatutan, dan musyawarah ala Timur. Lebih lanjut, bahwa penggabungan phronesis (Barat) dan tenggang raso/siri' (Timur) adalah tameng utama bagi aparatur negara untuk menghindari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) demi mewujudkan good governance. Pendidikan karakter dan etika pemerintahan juga perlu kembali berakar pada kearifan lokal untuk menyeimbangkan nilai hak dan kewajiban secara kontekstual.

3. Kesimpulan

Analisis kritis terhadap tradisi etika Barat dan Timur mengungkapkan bahwa dikotomi antara individualisme dan komunalisme, meskipun acap kali berguna sebagai kerangka teoretis dasar, pada akhirnya merupakan suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan atau reduktif. Penelusuran terhadap landasan filsafat klasik membuktikan bahwa pemikiran Barat, khususnya melalui Aristoteles dan Plato, sama sekali tidak mengusung otonomi egois yang terisolasi. Sebaliknya, tradisi Barat mengakui bahwa rasionalitas praktis (phronesis) dan otonomi kebebasan individu sejatinya dikembangkan untuk berinteraksi secara dinamis demi mengabdikan pada tatanan komunal atau polis guna mencapai keadilan serta kebahagiaan publik.

Di sisi lain, tradisi etika ketimuran seperti nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang berlandaskan institusi Nagari, falsafah Adat Basandi Syarak, dan musyawarah, serta

prinsip moral Siri' (menjaga kehormatan) pada masyarakat Bugis memang sangat berorientasi pada pemenuhan tugas komunitas dan kesejahteraan kolektif. Namun, tatanan komunal di Timur ini secara mutlak menuntut pembentukan nalar praktis, tanggung jawab, dan otonomi moral yang kuat dari masing-masing individu (seperti prinsip hiduik baraka dan nak haluih baso jo basi) untuk menyokong keharmonisan tatanan sosial tersebut. Dengan demikian, baik filsafat Aristoteles dan Plato maupun tradisi kearifan lokal Minangkabau dan Siri', sama-sama berkonvergensi pada pengakuan akan keniscayaan untuk mengintegrasikan otonomi pribadi dengan norma dan kewajiban sosial.

Analisis kritis terhadap diskursus etika Barat dan Timur mengukuhkan bahwa dikotomi antara individualisme murni dan komunalisme mutlak adalah pandangan yang terlalu menyederhanakan realitas moral manusia. Aristoteles dan Plato telah secara tegas membuktikan bahwa rasionalitas dan otonomi individu di Barat dikembangkan tidak untuk melayani egoisme, melainkan dididik agar mampu menyeimbangkan hasrat pribadi demi terwujudnya keadilan polis (negara). Demikian pula halnya, tradisi komunal Timur seperti ajaran adat Minangkabau dan etos Siri' masyarakat Bugis membuktikan bahwa keharmonisan komunal tidak dapat diraih oleh individu yang pasif; melainkan menuntut subjek-subjek moral yang tangguh, berakal (hiduik baraka), dan peka (tenggang raso). Pada akhirnya, seluruh sistem etika bertujuan menempatkan eksistensi manusia secara terhormat, di mana kebebasan individu dan tanggung jawab sosial saling menopang demi terwujudnya peradaban, kepemimpinan, dan kesejahteraan publik yang adil.

Referensi :

1. Nikonenko S. V. The Aristotelian way of life as contemporary moral ontology. *Vestnik SPbSU. Philosophy and Conflict studies*, 2017, vol. 33, issue 3, pp. 326–335.
2. Linguiti, A. (2015). Middle Platonic ethics [L'etica medioplatonica]. *Rivista di Storia della Filosofia*, 70(2), 359–379. <https://doi.org/10.3280/sf2015-00200>
3. Rahmat, A., Pujirahayu, E. W., & Syamsudin, M. (2023). The existence of Nagari in West Sumatra on state policy hegemony. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(2), 310–329. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.452>
4. Maulana, R. Y., Rakhman, M. O. H. A., & Sukri, M. H. D. A. (2025). Islamic public values in action: Learning from Nagari Minangkabau's approach to public governance. *Halduskultuur*, 24(1), 29–39. <https://doi.org/10.32994/hk.v24i1.368>
5. Hwang, K.-K. (2015). Morality “East” and “West”: Cultural concerns. In J. D. Wright (Ed.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences* (2nd ed., pp. 806–810). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64005-9>

6. Ames, R. T. (2024). Reconceiving agency for relationally-constituted human becomings. In *Relationality across East and West* (pp. 17–39). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003564034-4>
7. Russell, D. C. (2012). Phronesis and the virtues (NE VI 12–13). In R. Kraut (Ed.), *The Cambridge companion to Aristotle's Nicomachean ethics* (pp. 203–220). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCO9781139022484.010>
8. Vaccarezza, M. S. (2012). Aristotle and the social virtues, in IV, 1126b 10–1128b 9 [Aristotele e le virtù sociali, EN IV, 1126B 10–1128B 9]. *Acta Philosophica*, 21(2), 309–334.
9. Fiecconi, E. C. (2024). *Ethics for rational animals: The moral psychology at the basis of Aristotle's ethics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198886846.001.0001>
10. Fiecconi, E. C. (2024). *Ethics for rational animals: The moral psychology at the basis of Aristotle's ethics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198886846.001.0001>
11. Vasiliou, I. (2011). Aristotle, agents, and actions. In J. Miller (Ed.), *Aristotle's Nicomachean ethics: A critical guide* (pp. 170–190). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511575372.008>
12. Ambury, J. M. (2015). Plato's conception of soul as intelligent self-determination. *International Philosophical Quarterly*, 55(3), 299–313. <https://doi.org/10.5840/ipq201572340>
13. Brook, E. C. (2025). Plato's ethics of belief. *Synthese*, 206(4), Article 195. <https://doi.org/10.1007/s11229-025-05197-y>
14. Carone, G. R. (2005). *Plato's cosmology and its ethical dimensions*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511734915>
15. Sun, L., & Lin, Z. (2025). Tracing the body–soul dichotomy in Greek religion: From Orphism to Plato's psychology. *Religions*, 16(9), Article 1176. <https://doi.org/10.3390/rel16091176>
16. de los Ríos, I. (2018). Politics of the soul in Plato's Republic. In M. Migliori, L. M. Napolitano Valditara, & A. Fermani (Eds.), *Studies in the history of philosophy of mind* (Vol. 20, pp. 111–129). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78547-9_6
17. Bartninkas, V. (2023). Platonic politics of moderation and contemporary civic theory [Platoniškoji nuosaikumo politika ir šiuolaikinė pilietinė teorija]. *Problemos*, 104, 74–85. <https://doi.org/10.15388/Problemos.2023.104.6>
18. Chatzidimitriou, E., & Triantari, S. (2025). Emotional intelligence in the works of Plato. *Dia-noesis*, 18(2), 463–480. <https://doi.org/10.12681/dia.43448>

19. Stránský, J. (2023). The role of shame in Plato's moral psychology, or why are philosophers (and tyrants) not ashamed? [Role studu v Platónově morální psychologii aneb Proč se filosofové (a tyrani) nestydí?]. *Aither*, 15(29), 44–60. <https://doi.org/10.5507/aither.2023.010>
20. Jankauskas, S. (2012). Phaedo: Philosophizing as “second voyage” [Faidonas: Filosofavimas kaip “antrasis plaukimas”]. *Logos (Lithuania)*, 72, 19–37.
21. Hemida, D. T. (2024). A Sufi conception of order: Ibn ‘Arabī’s discourse on governance. *Journal of Islamic Studies*, 35(1), 46–81. <https://doi.org/10.1093/jis/etad016>
22. Jenkins, K., Kinsella, E. A., & DeLuca, S. (2019). Perspectives on phronesis in professional nursing practice. *Nursing Philosophy*, 20(1), Article e12231. <https://doi.org/10.1111/nup.12231>
23. Kristjánsson, K. (2022). Collective phronesis in business ethics education and managerial practice: A neo-Aristotelian analysis. *Journal of Business Ethics*, 181(1), 41–56. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04912-2>
24. Marcelo, G. (2020). Aristotle and Ricœur on practical reason. *Humanitas*, 76, 151–167. https://doi.org/10.14195/2183-1718_76_8
25. McCarthy, E. (2011). Beyond the binary: Watsuji Tetsurō and Luce Irigaray on body, self, and ethics. In B. W. Davis, B. Schroeder, & J. M. Wirth (Eds.), *Japanese and continental philosophy: Conversations with the Kyoto School* (pp. 212–228). Indiana University Press.
26. Roberts, L. (2017). A revolution of love: Thinking through a dialectic that is not “one”. *Hypatia*, 32(1), 69–85. <https://doi.org/10.1111/hypa.12306>
27. Maulana, R. Y., Rakhman, M. A., Sukri, M. A., & Wahid, M. (2025). Non-Western philosophy and public administration: Public service provision in Nagari Minangkabau, Indonesia. In *Islamic public value: Theory, practice, and administration of indigenous cooperative institutions* (pp. 335–357). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035333646.00027>
28. Mochlasin, & Budiharjo. (2024). Islamic work ethics, local wisdom, and spirit of capitalism: Insight from a perantau Minangkabau. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 14(2), 289–318. <https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318>
29. Nopriyasman, N., Asnan, G., Ferdinal, F., Zahid, I., & Ritonga, A. H. (2025). Minangkabau philanthropy: The spirits and behaviours of generosity of the Nagari communities in facing natural disasters. *E3S Web of Conferences*, 604, Article 02007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560402007>
30. Arifin, M. Y., Salle, S., Rinaldy Bima, M., Ilham, M. A., & Ramadhan, A. R. W. (2026). The role of the Minangkabau traditional community's culture of consensus building

- as a pillar of democracy in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Al-Dustur*, 9(1), 35–50. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v9i1.10377>
31. Wahidi, R., Afwadzi, B., Syafril, & Rahman, R. (2025). Tawhid and Qur'anic interpretation in early 20th-century Minangkabau: A philological-theological study of Abdul Latif Syakur's al-Tawhīd (1882–1963) [Tauhid dan penafsiran al-Qur'an di Minangkabau awal abad ke-20: Sebuah kajian filologis-teologis atas al-Tawhīd (1882–1963) karya Abdul Latif Syakur]. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 26(2), 327–350. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i2.6268>
 32. Ashadi, A., Sefriyono, Zulfis, & Tanggok, M. I. (2025). Integration between adat and Islam in the practice of religious freedom in West Sumatra. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(1), 33–50. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.3>
 33. Zulfikarni, Z., Thahar, H. E., & Hayati, Y. (2026). Minangkabau proverbs as a representation of character values rooted in cultural wisdom. *International Journal of Society, Culture and Language*, 14(1), 226–241. <https://doi.org/10.22034/ijscsl.2025.2072646.4213>
 34. Setiawati, M., Imron, A., Wiyono, B. B., & Burhanuddin. (2020). An exploration of visionary leadership behaviours in Indonesia: The values of local Minangkabau wisdom. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 1223–1240.
 35. Hakim, L., Hadi, R. T., & Ahmad. (2025). Minangkabau leadership philosophy: Synthesizing religion, adat, and intellectuals in the history of Islamic political thought. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 49(1), 117–140. <https://doi.org/10.30821/miqot.v49i1.1357>
 36. Ningsih, D., Pahrudin, A., Koderi, & Fauzan, A. (2026). Mapping of local wisdom-based education management studies in the last decade: A bibliometric analysis. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 25(1), 310–331. <https://doi.org/10.26803/ijlter.25.1.16>
 37. Simon, G. M. (2014). *Caged in on the outside: Moral subjectivity, selfhood, and Islam in Minangkabau, Indonesia*. University of Hawai'i Press.
 38. Charvet, J. (1998). The possibility of a cosmopolitan ethical order based on the idea of universal human rights. *Millennium: Journal of International Studies*, 27(3), 523–541. <https://doi.org/10.1177/03058298980270031101>
 39. Kwak, J.-H., & Cheng, K. (Eds.). (2024). *Relationality across East and West*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003564034>
 40. Hoel, N. (2025). Capacious embodiment and the violence of deliverance: A feminist perspective. *Journal of Africana Religions*, 13(1), 128–134. <https://doi.org/10.5325/jafrirel.13.1.0128>

41. Carey, S. (2000). Cultivating ethos through the body. *Human Studies*, 23(1), 23–42.
<https://doi.org/10.1023/a:1005551410889>
42. Hwa, K. (2022). Global urban humanity – the “embodiment” of embodying peripheries. In *Embodying peripheries* (pp. 9–23). Firenze University Press.
<https://doi.org/10.36253/978-88-5518-661-2.01>
43. Lasiyo. (1997). *Pemikiran filsafat Timur dan Barat (Studi komparatif)*. Jurnal Filsafat. Universitas Gadjah Mada.
44. Djohan, D., Milwan, & Karyana, A. (2023). *Buku materi pokok etika pemerintahan FSPE4401*. Universitas Terbuka.
45. Suryandari, K. A. (2026). *Modul 3: Etika Pemerintahan dalam Filsafat Timur*. Universitas Lampung & Universitas Terbuka.